

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Filipina merupakan salah satu negara besar yang berada di kawasan Asia Tenggara. Bersama dengan negara Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia dan Timor Leste. Sama halnya seperti Indonesia, Filipina merupakan sebuah negara kepulauan dengan memiliki beberapa pulau didalamnya yang mana terdiri dari 7.107 pulau. Selain terkenal sebagai negara kepulauan, Filipina juga seringkali dianggap sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara yang mempunyai pengaruh budaya barat yang sangat kuat. Hal ini dikarenakan Filipina telah melewati perjalanan panjang dimana Filipina pernah berada di bawah kekuasaan negara – negara Barat, seperti Spanyol, Inggris dan Amerika Serikat.

Dalam dunia internasional, Filipina dapat dikatakan aktif dalam hubungan internasional. Hal ini terbukti pada tahun 1967, Filipina bersama Indonesia, Malaysia, Thailand dan Singapura sepakat membentuk organisasi regional yang disebut ASEAN (Association of South East Asian Nation) yang mana mempunyai tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, pengembangan kebudayaan negara – negara anggota, serta memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regional.

Sebagai salah satu negara berkembang pasti banyak sekali permasalahan yang dihadapi. Di bawah pemerintahan Presiden Rodrigo Roa Duterte, atau yang lebih dikenal sebagai Presiden Duterte. Filipina mendapat banyak tantangan dari dunia internasional. Setidaknya terdapat beberapa isu yang berkembang dalam era Duterte ini seperti isu Drugs smuggling, terorisme, sparatisme serta isu perbatasan wilayah yang mana mengancam kedaulatan negara Filipina.

Dengan terpilihnya Rodrigo Duterte sebagai Presiden Filipina ke – 16, menempatkan Filipina kepada sebuah tantangan baru. Ia muncul dengan sebuah pemikiran yang berbeda dari pemimpin sebelumnya yakni Benigno Aquino III. Hal ini merupakan hal yang sangat wajar karena gagasan, pemikiran dan kepribadaian masing – masing pemimpin sangat berbeda. Pemikiran yang berbeda tersebut terlihat dari kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Duterte. Kebijakan politik luar negeri Filipina sendiri terbentuk dari keadaan atau kondisi negara pada saat tertentu, serta di pengaruhi oleh tindakan atau kebijakan negara lain yang mana mempunyai hubungan dengan Filipina.

Dalam awal masa pemerintahannya, Presiden Rodrigo Duterte mengukung Kebijakan politik luar negeri yang dikenal dengan *Independent Foreign Policy*, yang mana sesuai dengan kebijakan luar negeri Filipina. Dimana Filipina ingin menunjukkan kedaulatannya melalui kebijakan – kebijakan baru yang dirumuskan oleh para pembuat kebijakan. Presiden Duterte ingin menunjukkan kepada dunia internasional bahwa dibawah kepemimpinannya Filipina telah meninggalkan identitasnya yang lama dan tidak tunduk ke negara manapun.

Hal ini terlihat seperti kebijakan Filipina dalam membangun hubungan diplomatik yang baik dengan Republik Rakyat Tiongkok. Dimana pada masa mantan Presiden Benigno Aquino III kebijakan yang diterapkan cenderung bersikap lebih keras dalam politik luar negerinya terhadap RRT, sedangkan dalam masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte mengadopsi gaya kepemimpinan yang kooperatif dengan menempuh jalur yang lebih bersifat damai dengan mengadakan dialog dan diskusi bersama dalam menyelesaikan permasalahan di antara kedua belah pihak negara.

Kebijakan politik luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte memiliki arah dan tujuan yang semuanya mengarah kepada kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, serta kemajuan negaranya. Presiden Duterte mengutamakan kepentingan nasional negaranya dan menggaris bawahi permasalahan – permasalahan domestiknya yang perlu segera diatasi secepat mungkin.

Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat tentu saja Filipina akan menjalankan kebijakan politik luar negerinya dalam dunia internasional. Yang mana kebijakan politik luar negeri suatu negara tidak akan lepas dari kepentingan nasional negara itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan politik luar negeri suatu negara diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan nasional negaranya dengan tepat. Hal ini pun tidak akan terlepas dari peran pemerintahan yang berkuasa dalam negara Filipina. Dalam mengatasi segala isu – isu dan permasalahan yang timbul, Presiden Duterte mengeluarkan kebijakan yang jauh lebih tegas dan berbeda dengan presiden sebelumnya dalam menanggapi isu – isu

yang terjadi. Hal ini menjadikan kebijakan yang diterapkan baik kebijakan dalam negeri maupun luar negeri era Duterte mengalami sebuah gebrakan yang baru dalam negara tersebut. Dengan demikian era Duterte ini menunjukkan ada perubahan kebijakan luar negeri di Filipina.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka penulis telah merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Hal apa yang mempengaruhi perubahan kebijakan (luar negeri) negara Filipina dalam Era Duterte?
2. Bagaimana wujud dari kebijakan yang diberlakukan oleh presiden Duterte?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

- Untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi perubahan orientasi kebijakan luar negeri Filipina yang diterapkan oleh Presiden Rodrigo Roa Duterte yang mana merupakan presiden baru Filipina.

1.4. Landasan Teori

Untuk menjawab rumusan masalah diatas, penulis menggunakan teori Idiosinkratik. Karena dalam hubungan internasional individu memiliki peranan yang signifikan, dimana dalam studi hubungan internasional teoritis memperhatikan perilaku individu, karena individu sebagai salah satu bagian dari pembuat keputusan atau kebijakan untuk mempengaruhi hasil dari politik luar negeri. Politik luar negeri merupakan suatu strategi untuk menghadapi politik internasional yang sedang berlangsung. Maka faktor individu ini akan mempengaruhi setiap kegiatan politik luar negeri dalam suatu negara.

Dan untuk membuat suatu kebijakan individu akan dipengaruhi oleh latar belakang, arus informasi yang diketahui, keinginan yang dimiliki serta tujuan yang hendak dicapai (*occasion for decision*) individu tersebut. Kuatnya pengaruh seorang individu dalam decision making process pada akhirnya memunculkan istilah idiosyncratic dalam politik luar negeri. Idiosinkratik mempelajari hal-hal yang mempengaruhi seorang individu dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh pada hubungan luar negeri.

Hal ini diperjelas dimana dalam keberadaan politik luar negeri Idiosinkratik merupakan salah satu faktor penentu dalam keberadaan politik luar negeri tersebut (Rosenau, 1976:15). Selain itu kategori dalam asumsi-asumsi dasar pengaruh juga menempatkan Idiosinkratik sebagai salah satu kategorinya (Perwita & Yani, 2005:32).

Idiosinkratik sendiri merupakan penggabungan istilah yang terbentuk dari penggabungan kata *ideology* dan *syncratic* atau *syncratis*. Ideologi menurut Anthonio Gramsci adalah kerangka atau paradigma analisis untuk memahami dan menyelesaikan berbagai masalah. Dan yang dimaksud syncratic adalah perpaduan semua yang baik dari semua yang ada. Idiosinkratik dapat digunakan dalam analisa politik luar negeri suatu negara bila pengaruh yang dihasilkan oleh seorang individu dalam pembuatan kebijakan adalah total.

Secara umum Idiosinkratik adalah semua aspek yang dimiliki oleh pembuat keputusan, nilai, bakat, dan pengalaman sebelumnya yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan ataupun pengambilan kebijakan yang dilakukannya. Secara lebih singkat, James Coulombis dan Wolfe mendefinisikan faktor Idiosinkratik sebagai salah satu variabel yang berkaitan dengan persepsi, citra (image), dan karakteristik pribadi individu pembuat keputusan.

Sedangkan Idiosinkratik menurut H.C Warren adalah keseluruhan pengaturan mental seseorang pada tahap manapun dalam perkembangannya (Kartini, 1974: 74). Ini meliputi fase-fase dari karakteristik manusia, intelektualitas, tempramen, keahlian moral, dan sikap yang telah dibangun dalam perjalanan hidup seseorang setelah memperhatikan perkembangan dalam fase-fase yang telah dibangun tersebut.

Untuk mempelajari Idiosinkratik maka perlu dipelajari kepribadian seseorang tersebut. Kepribadian seseorang sering kali diklasifikasikan menjadi tipe pribadi yang tertutup dan pribadi yang terbuka. Disisi lain terdapat pula pengklasifikasian

kepribadian berdasarkan tinggi rendahnya karakter dominasi seseorang. Oleh Etheredge ke dua klasifikasi tersebut dihubungkan sehingga dapat ditemukan karakteristik kepribadian yang dapat mempengaruhi politik luar negeri yaitu sebagai berikut:

- Block Leaders

Merupakan gabungan antara kepribadian yang tertutup dan sangat mendominasi. Individu memiliki ciri ulet dan mendominasi pada satu sentral.

- World Leaders

Merupakan gabungan antara kepribadian yang terbuka dan sangat mendominasi ciri-ciri dari pemimpin ini adalah kecenderungan mempergunakan kekuatan militer, fleksibel, dan pragmatis.

- Maintaners

Merupakan gabungan antara kepribadian yang tertutup dan kurang mendominasi. Memiliki kecenderungan untuk mempertahankan status quo.

- Conciliators

Merupakan gabungan antara kepribadian yang terbuka dan kurang mendominasi. Bercirikan penolong dan kurang konsisten (Hopple, tt: 78-79).

Kemudian diperjelas lagi oleh Margaret G. Hermann yang menggambarkan karakter kepribadian yang ada dalam masing-masing pemimpin negara didunia, yaitu:¹

- Terlatih dalam urusan-urusan luar negeri (training in foreign affairs)
Terlatih disini dimaksudkan pada individu yang telah memegang posisi penting dalam politik atau pemerintahan yang akan memberikan pengetahuan tentang urusan-urusan luar negeri dan proses pembuatan keputusan.
- Nasionalisme
Seberapa pengaruh keterkaitan emosi yang dimilikinya terhadap bangsanya, khususnya rasa cinta tanah air. Lebih lanjut adanya tekanan agar menegakkan kehormatan dan kedaulatan negaranya.
- Percaya pada kemampuan sendiri untuk mengendalikan situasi (believe in one's own ability to control events)
Karakter ini melihat kemampuan individu dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi sehingga dapat mengendalikan keadaan.
- Kebutuhan akan kekuatan
Hal ini merujuk pada perhatian individu untuk mendirikan, memelihara atau mengembalikan kekuatan negaranya.

¹Hermann, Margaret G. 1980. Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal Characteristics of Political Leaders Author(s) Political Leader. *International Studies Quarterly*, 24(1); pp.7-46

- Kebutuhan akan persatuan

Konseptualisasi dari perhatian akan kebutuhan untuk hubungan kekerabatan dan persatuan yang damai.

- Conceptual complexity

Tingkat perbedaan seseorang dalam menganalisa lingkungannya dimana masing-masing individu memiliki pandangan yang berbeda dalam mengamati suatu kejadian.

- Rasa tidak percaya kepada orang lain

Karakter yang penuh dengan ketidakpercayaan atau rasa curiga yang diikuti dengan perasaan ragu, kesukaran, tidak ingin memberi dan ketakutan akan orang lain. Sehingga meningkatnya prasangka buruk dan ragu terhadap orang lain (Falkowski, 1979: 18-19).

Karakteristik individu akan menghasilkan perbedaan pada orientasi individu tersebut terhadap kepribadian politik. Berdasarkan kerangka yang diuraikan, maka Hermann dalam Falkowski memberikan karakteristik pribadi yang merefleksikan kepribadian politik, yaitu :

- Expansionist

Individu tidak ingin kehilangan kontrol. Mempunyai keinginan untuk memiliki kontrol yang besar (high need for power), memiliki kemampuan yang rendah dalam menyadari adanya beberapa alternatif pilihan pembuatan keputusan (low conceptual complexity) dan mempunyai ketidakpercayaan terhadap orang lain (high distrust of others). Namun individu yang berkarakter nasionalis

mempunyai kehendak yang kuat dalam memelihara kedaulatan dan integrasi negara (high nasionalism). Individu tidak mementingkan arti hubungan pertemanan (low need for affiliation) dan memiliki tingkat inisiatif yang tinggi (high believe in control over events). Tipe expansionist ini menggunakan agresifitas dalam mewujudkan tujuannya.

- Active Independent

Individu semacam ini memiliki keinginan besar untuk berpartisipasi dalam komunitas internasional tanpa membahayakan hubungan yang sudah terjalin dengan negara-negara lain. Individu akan berusaha mempertahankan kebebasan berusaha untuk menggalang hubungan sebanyak mungkin. Ciri-ciri dari individu yang termasuk golongan ini adalah high nasionalism, high conceptual complexity, low distrust of others, high believe in own control, high need for affiliation, low need for power.

- Influential

Individu berusaha untuk menjadi pusat dari lingkungan, mempunyai kehendak dan hasrat untuk mempengaruhi kebijakan politik luar negeri negara lain. Pemimpin dengan karakter seperti ini akan menciptakan bahwa tujuannya adalah yang paling penting dibandingkan yang lain. Pemimpin negara akan bersikap protektif negara-negara yang menentanginya. Ciri-cirinya adalah low nasionalism, low conceptual complexity, low distrust of others, high believe in own control, high need for affiliation, high need for power.

- Mediator

Karakter individu ini sering menyatukan perbedaan diantara negara dan memainkan peran “go-between”. Pemimpin mendapatkan negara-negara sebagai perwujudan perdamaian dunia dan selalu mencoba untuk menyelesaikan permasalahan dunia. Ciri-cirinya adalah low nasionalism, high conceptual complexity, low distrust of others, high believe in own control, high need for affiliation, high need for power. Pada umumnya pemimpin seperti ini senang berada dibelakang layar. Meskipun memberikan implikasi kepada negara lain namun menghindari intervensi.

- Opportunist

Seseorang yang berusaha untuk tampil bijaksana, yang bertujuan untuk mengambil keuntungan dari keadaan yang dihadapi. Pemimpin seperti ini biasanya mengeluarkan kebijakan berdasarkan apa yang ia anggap perlu dan sedikit mengesampingkan komitmen ideologi. Ciri-cirinya adalah low nasionalism, high conceptual complexity, low distrust of others, low believe in own control, low need for affiliation, low need for power.

- Participative

Mempunyai hasrat untuk memfasilitasi keterlibatan sebuah negara dalam arena internasional. individu seperti ini tertarik untuk mencari yang berharga untuk negara dan mencari alternatif solusi dari permasalahan yang dihadapi negara atau negara lain. Ciri-cirinya adalah low nasionalism, high conceptual

complexity, low distrust of others, low believe in own control, high need for affiliation, low need for power (Falkowski. 1979: 20).

Secara lebih lanjut, definisi karakter kepribadian dijelaskan oleh hermann dan Falkowski sebagai berikut ²:

INDIKATOR UMUM DARI KEPRIBADIAN POLITIK	DEFINISI
<i>High nasionalism</i>	Individu yang berkarakter nasionalis mempunyai kehendak yang kuat dalam memelihara kedaulatan dan integrasi negara
<i>High believe in own control</i>	Memiliki tingkat inisiatif yang tinggi
<i>High need for affiliation</i>	Individu mementingkan arti hubungan pertemanan
<i>High conceptual complexity</i>	Memiliki kemampuan yang tinggi dalam menyadari adanya beberapa alternatif pilihan pembuatan keputusan
<i>High distrust of others</i>	Mempunyai ketidak percayaan terhadap orang lain
<i>High need for power</i>	Mempunyai keinginan untuk memiliki kontrol yang besar
<i>Low nasionalism</i>	Mempunyai kehendak yang rendah dalam memelihara kedaulatan dan integrasi negara
<i>Low conceptual complexity</i>	Memiliki kemampuan yang rendah dalam menyadari adanya beberapa alternatif pilihan pembuatan keputusan
<i>Low believe in own control</i>	Memiliki tingkat inisiatif yang rendah
<i>Low need for affiliation</i>	Individu tidak mementingkan arti hubungan pertemanan
<i>Low distrust of others</i>	Memiliki kepercayaan rendah terhadap orang lain
<i>Low need for power</i>	Mempunyai keinginan untuk memiliki kontrol yang rendah

(Sumber : Falkowski, 1979: 20)

Menurut Baghat Korany, peranan individu di dalam proses pembuatan keputusan, khususnya dalam merumuskan politik luar negeri sangat nyata di negara

² Falkowski, Laurence S. 1979. Psychological models in internasional politic : west view special studies in internasional relations, west view press, Boulder. 2011.

berkembang. Dimana pendekatan psikologis merupakan faktor penentu untuk mengkaji politik luar negeri negara berkembang. Oleh karena itu maka faktor Idiosinkratik seorang individu dalam hal ini pemimpin negara sangatlah berpengaruh pada perumusan politik luar negeri khususnya bagi negara berkembang (Korany. 1991: 8-9).

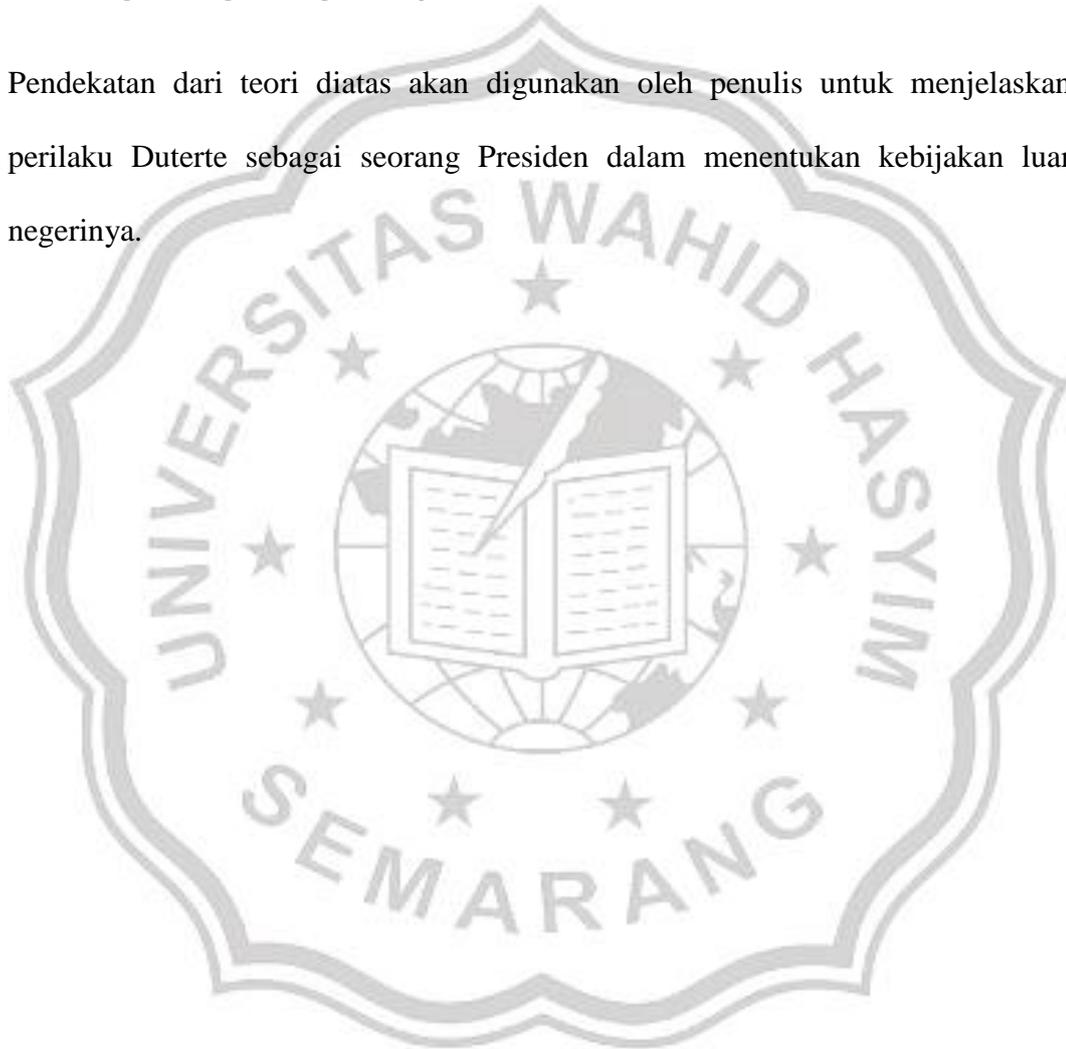
Sedangkan Menurut pemikiran James N. Rosenau, ada empat sumber-sumber yang mempengaruhi pengambilan keputusan politik luar negeri yaitu salah satunya idiosinkratik (idiosyncratic sources) yang merupakan sumber internal yang melihat nilai-nilai pengalaman, bakat serta kepribadian elit politik yang mempengaruhi persepsi, kalkulasi, dan perilaku mereka terhadap kebijakan luar negeri. Disini tercakup juga persepsi seorang elit politik tentang keadaan alamiah dari arena internasional dan tujuan nasional yang hendak dicapai. Secara lebih singkat, James Coulobmbis dan Wolfe mendefinisikan faktor idiosyncratic sebagai salah satu variabel yang berkaitan dengan persepsi, citra (image), dan karakteristik pribadi individu pembuat keputusan.

Menurut Rosenau, dari keempat faktor yang mempengaruhi politik luar negeri setiap negara akan ada selalu faktor yang lebih dominan dibandingkan faktor lainnya. Hal ini akan berbeda dengan bagi setiap negara tergantung dari kondisi geografis, yaitu ketersediaan sumber daya alam, kondisi perekonomian, serta status politik masing-masing negara.

Negara maju memiliki kecenderungan untuk menempatkan peran sebagai faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan keputusan luar negeri tersebut,

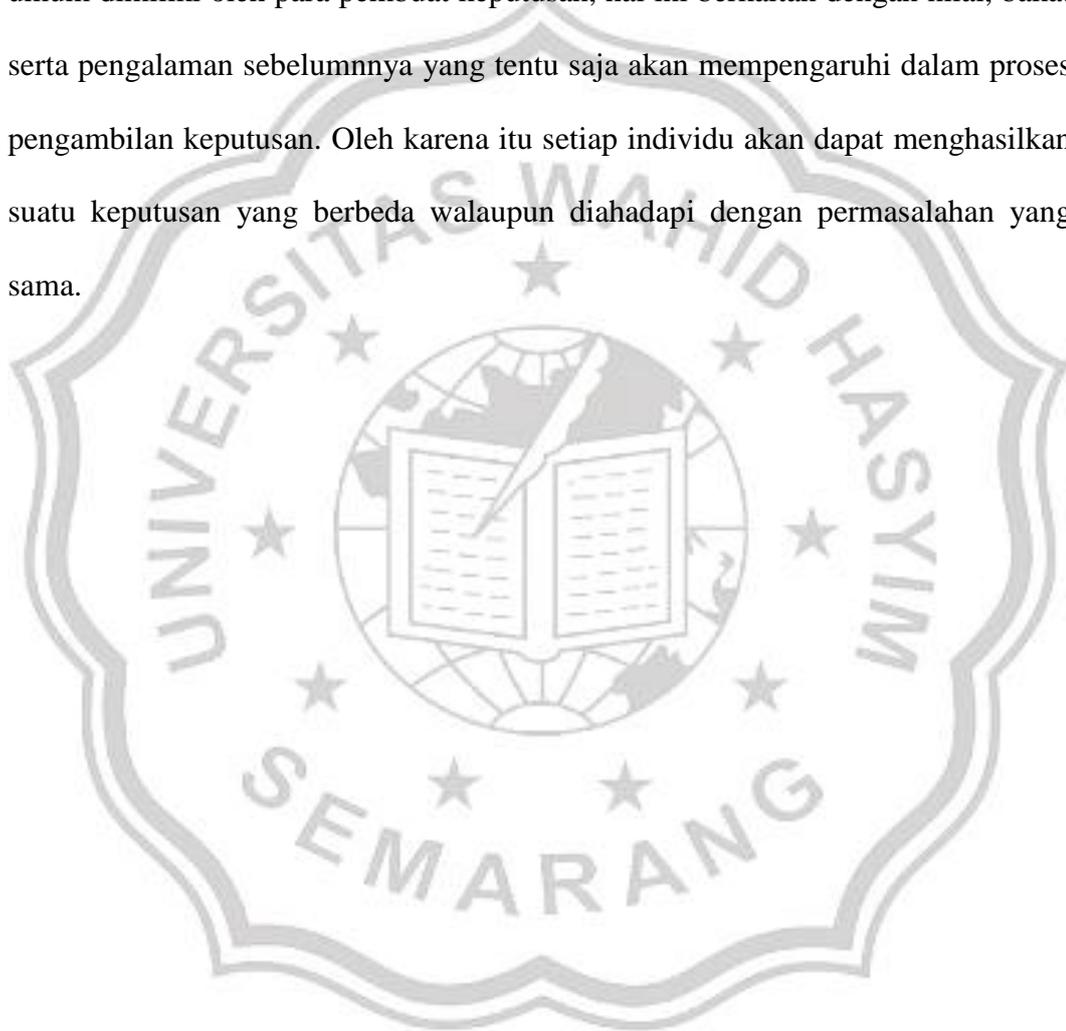
sedangkan negara berkembang faktor idiosyncratic pembuat keputusan atau seorang pemimpin menjadi faktor penentu dalam menentukan sikap politik luar negeri sebuah negara. Hal ini menurut Rosenau dikarenakan negara-negara berkembang cenderung memiliki hambatan lebih besar menyangkut birokrasi dibandingkan negara-negara maju (Rosenau. 1980: 132).

Pendekatan dari teori diatas akan digunakan oleh penulis untuk menjelaskan perilaku Duterte sebagai seorang Presiden dalam menentukan kebijakan luar negerinya.



1.5. HIPOTESIS

Dari penjabaran sebelumnya, berkaitan dengan orientasi perubahan kebijakan luar negeri Filipina banyak dipengaruhi oleh idiosinkretik pemimpinnya, yakni Duterte sebagai kepala negara. Idiosinkretik sendiri merupakan hal yang secara umum dimiliki oleh para pembuat keputusan, hal ini berkaitan dengan nilai, bakat serta pengalaman sebelumnya yang tentu saja akan mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu setiap individu akan dapat menghasilkan suatu keputusan yang berbeda walaupun dihadapi dengan permasalahan yang sama.



1.6. Metode Penelitian

- Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan logika induktif. Seperti yang kita ketahui bila berbicara tentang metode penelitian, tentu saja akan melibatkan pengumpulan data yang mana akan digunakan dalam menjawab setiap rumusan masalah yang ada, termasuk didalamnya disebutkan mengenai jenis penelitian, sumber data serta teknik analisa data. Penelitian deskriptif menurut Whitney merupakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat³. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk hubungan antar individu, sikap-sikap, pandangan serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Oleh karena itu penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif guna menjelaskan tentang hal apa saja yang mempengaruhi orientasi perubahan kebijakan luar negeri negara Filipina Era Presiden Duterte.

³ F.L. Whitney, *"The Element of Research"*, New York: Prentice Hall Inc., 1960, hal.160.

- Sumber Data

Data yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data sekunder, yang bersumber dari sejumlah literatur, baik berupa buku, jurnal, berita dan website. Sumber data tersebut nantinya akan diolah dengan menggunakan teori dan konsep yang telah dipilih oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah.

- Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah telaah studi pustaka (library research). Pengumpulan data studi pustaka adalah dengan menggunakan sumber data sekunder yang berkaitan dengan masalah penelitian.

- Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh penulis akan dianalisa secara kualitatif, yaitu dengan menjelaskan dan menganalisis data yang berhasil penulis dapatkan untuk kemudian dihubungkan dengan penjelasan yang masuk akal.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Landasan Teori
- E. Hipotesis
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Umum Orientasi Kebijakan Luar Negeri Filipina

- A. Dasar Kebijakan Luar Negeri Filipina
- B. Oreintasi Kebijakan Luar Negeri Filipina Sebelum Presiden Duterte (Presiden Benigno Aquino III)
- C. Oreintasi Kebijakan Luar Negeri Filipina Era Presiden Duterte (2016-2017)

Bab III Faktor Yang Melatarbelakangi Perubahan Oreintasi Kebijakan Luar Negeri Filipina

- A. Idiosinkretik Duterte
- B. Bentuk perubahan Orientasi Kebijakan Luar Negeri Duterte

Bab IV Kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA